

Peningkatan Kinerja Aparat Kampung Melalui Pelatihan di Kampung Wisata Binsari

Djamil Hasim^{1*}, A.M. Dadang², Ismar HI. Garuan Mahmud³

¹Program Studi Administrasi Publik, IISIP Yapis Biak, Indonesia.
*djmail.hasim1964@gmail.com

²Program Studi Administrasi Perkantoran, IISIP Yapis Biak, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP Yapis Biak, Indonesia

Abstrak

Kinerja merupakan pengukuran hasil kerja seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kampung melalui pelatihan di Kampung Wisata Binsari. Penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan Aparatur Kampung Dalam meningkatkan Kinerja pada Kampung Wisata Binsari dilihat cukup baik, hal ini dilihat bahwa dukungan dan kerja sama sebagai tangan pemerintah dalam koordinasinya dapat melibatkan masyarakat ikut serta dalam pelatihan aparatur kampung dalam meningkatkan kinerja pada kampung wisata binsari sehingga pelatihan aparatur kampung wisata binsari dapat berjalan dengan baik dan juga adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Adanya program-program pemerintah yang diterapkan membawa perubahan dalam meningkatkan kemajuan masyarakat yang lebih meningkat.

Kata Kunci: Kinerja, Aparat Kampung, Pelatihan.

PENDAHULUAN

Kinerja sebagai salah satu orientasi manajemen dewasa ini, keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai hal-hal yang mempengaruhi kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya faktor secara langsung yaitu kurangnya sumber daya yang berkualitas sehingga didalam melakukan pekerjaan kurang optimal, sedangkan faktor yang tidak lang-

sung karena kepribadian atau karakteristik dari sumber daya tersebut (Haidir, 2013).

Kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut (Galib Lahada,

2015) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang di peroleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu (Haidir, 2013).

Menurut (Ami Jayanti & Nazwirman, 2020) Job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Menurut (Nurmasari, 2017) Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Menurut (Suryani & E.H.J., 2018) Mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan

mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang RI No.6 tahun 2014). Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kampung Wisata Binsari kabupaten Biak Numfor. Penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data di peroleh dari; mewawancarai informan dan peneliti turun ke lapangan

untuk melihat secara langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui;

- a) Wawancara, peneliti mewawancarai informan secara langsung (tatap muka) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b) Observasi, selain kedua metode atau teknik yang di gunakan, penulis juga terlibat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati keberlangsungan proses (perilaku) dari objek atau subjek yang diteliti tersebut.
- c) Studi Kepustakaan, penelitian yang telah di lakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data referensi dari berbagai buku-buku, Kamus literature lainnya, sebagai bahan teori yang dianggap relevan dengan pokok penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus



menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas. Adapun dalam analisis data kualitatif terdapat 3 langkah dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kampung di Kampung Wisata Binsari.

Peran Kepala Kampung/Desa dalam merealisasi dukungan pelatihan aparatur dan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh kaur pemerintah dan masyarakat kampung, karena Pelatihan Aparatur Kampung Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kampung Wisata Binsari merupakan usaha yang berasal dari unit terendah yang harus dilaksanakan dan di bina serta dikembangkan secara sistematis dan terarah dalam usaha yang menyeluruh. Kepala Kampung/Desa sebagai pengawas masyarakat yang dilantik oleh Pemerintah dan ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin dan mengatur kampung sebagai coordinator yang mempunyai peran yang sangat

penting terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memajukan kampung/desanya dan memperhatikan masyarakat di kampung/desanya, Kualitas seorang pemimpin yakni kepala kampung atau desa sangatlah begitu besar dan penting dalam memainkan peranan dan harus mampu semaksimal mungkin dalam mewarnai kemajuan kampung atau desanya.

Dalam system pemerintah republik indonesia, Desa/Kampung merupakan suatu terkecil dari wilayah Negara dan merupakan unit pemerintah terendah, Organisasi pemerintahnya disebut pemerintah desa dan berada di bawah camat/distrik kepala kampung dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban tertentu yang sifatnya disisipkan yaitu kewenangan memutuskan, menetapkan maupun mempertanggung jawabkan (responsibiliti). Atas dasar hal tersebut, maka koordinasi pemerintah pada hakekatnya berupaya memandukan atau mengintegrasikan, menegrasikan menyelaraskan sebagai kepentingan

yang saling berkaitan beserta segenap gerak langkah waktu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama koordinasi mulai di laksanakan dari proses perumusan kebijakan, pencapaian pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Sehubungan dengan itu, baik dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah maupun dalam rangkai menggerakkan dan memperlancarkan pelaksanaan Pelatihan Aparatur Kampung Dalam Meningkatkan Kinerja pada Kampung Wisata Binsari, Kegiatan pemerintah dipadukan, diserasikan, dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpukan tindih, koordinasi antara kegiatan aparatur pemerintah tidak dapat di hindarkan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kampung yang dipimpin oleh kepala kampung secara langsung menggelar rapat untuk menentukan keputusan secara kolektif. Seluruh aparat kampung di undang untuk menghadiri rapat. Kemudian Aparat Kampung dimintai masukan dan pendapat mengenai Pelatihan aparatur

kampung dalam meningkatkan kinerja pada kampung Wisata Binsari. Selanjutnya, pelatihan aparatur kampung dalam meningkatkan kinerja pada kampung Wisata Binsari sangat penting untuk memenuhi kekurangan masyarakat agar masyarakat dapat berkehidupan yang layak dan bisa dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga baik dalam tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat di kampung Wisata Binsari. Menurut beberapa masyarakat yang dapat merespon bahwa masyarakat di Kampung Wisata Binsari merasa bangga sebab Kepala Kampung telah mempermudah mereka untuk melengkapi identitas atau KTP dan KK (kartu keluarga) yang di urus oleh Kepala Kampung di Kependudukan dan di kemsliksn kepada masyarakat di tempat. Adapula beberapa masyarakat yang juga mengatakan bahwa mereka merasa puas dengan adanya program-program pemerintah yang diterapkan membawa perubahan dalam meningkatkan kemajuan masyarakat yang lebih meningkat. Dan untuk sementara masyarakat di Kampung

Wisata Binsari sedang membangun perbengkelan masyarakat dan perbengkelan viber, Masyarakat juga mengatakan bahwa program inipun Kepala Kampung Wisata Binsari yang menerapkan agar di bangun untuk mengurangi pengangguran di dalam Kampung Wisata Binsari.

Menurut (Kumaat & Dotulong, 2015) Pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi pegawai, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan meliputi banyak kegiatan yang menginformasikan pegawai tentang kebijakan, prosedur untuk kemajuan organisasi dimasa yang mendatang. Pelatihan dirancang untuk meningkatkan keahlian seseorang. Pengembangan dan inovasi dalam oragnisasi menjadi hal yang perlu ada untuk membawa organisasi menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Maju mundurnya organisasi/instansi tergantung juga pada kreatifitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia.

Di dalam kekuasaan Kepala Kampung Wisata Binsari pun ada pengaruh yang di kuti oleh 9 (sembilan) anggota masyarakat yang masing-masingnya di setiap RT, RW yang berbeda mereka juga merespon tentang kerajinan tangan/pengembangan diri yang dirangkul dalam bentuk kelompok dari kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, dan juga kaum pemuda-pemudi yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga budidaya dan budaya masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Pelatihan Aparatur Kampung Dalam meningkatkan Kinerja pada Kampung Wisata Binsari dilihat cukup baik, hal ini dilihat bahwa dukungan dan kerja sama sebagai tangan pemerintah dalam koordinasinya dapat melibatkan masyarakat ikut serta dalam pelatihan aparatur kampung dalam meningkatkan kinerja pada kampung wisata binsari sehingga pelatihan aparatur kampung wisata binsari dapat berjalan dengan baik dan juga adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, kepala Kampung Wisata

Binsari sebagai koordinator pelatihan Aparat kampung dalam meningkatkan Kinerja pada kampung Wisata Binsari, mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi dan memberikan semangat serta mendorong dan mengajak masyarakat agar bekerja sama-sama merangkul ide-ide yang membawa kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Jayanti, G., & Nazwirman, N. (2020). Model Kinerja Pegawai: Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan kerja variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 157-173.
<https://doi.org/10.30596/jimb.v21i2.4582>
- Galib Lahada. (2015). Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Lurah Kayamanya Induk Kecamatan Poso Kota. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1).
- Haidir. (2013). Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 1(2), 107-115.
- Kumaat, R. J., & Dotulong, L. O. H. (2015). Pengaruh Pendidikan, pelatihan, inovasi terhadap kinerja pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 3(3), 331-340.
- Nurmasari, R. K. dan. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan dan Informasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA*, 3(1), 122-134.
- Suryani, N. K., & E.H.J., J. (2018). *Kinerja Organisasi* (1st ed.). Deepublish.